RENCANA KERJA TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda-Balitbangda Lt.4

TENGGARONG

SALINAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
b. bahwa Rencana Kerja perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai landasan penyusunan rencana kegiatan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan Renja-PD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai:
   a. gambaran tentang Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam 1 (satu) tahun anggaran;
   b. pedoman setiap PD dalam menyusun RKA-SKPD Tahun 2026; dan
   c. pedoman PD dalam peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian Program dan kegiatan pelayanan PD sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Renja-PD Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi dan integrasi Program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan antara rencana strategis dengan pelayanan PD, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu yang menjadi rencana strategis PD.

BAB III
RENJA-PD

Pasal 3

(1) Renja masing-masing PD Tahun 2026, disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
   BAB I : Pendahuluan;
   BAB II : Hasil Evaluasi Renja-PD Tahun Lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V : Penutup.

(2) Renja-PD Tahun 2025 dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Rencana Kerja Inspektorat;
d. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
h. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
i. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
j. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
l. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
m. Rencana Kerja Dinas Sosial;
n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
p. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
q. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
s. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

t. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
u. Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
v. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
w. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
x. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
y. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
z. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
aa. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan;
bb. Rencana Kerja Dinas Perkebunan;
cc. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
dd. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
ee. Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
ff. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
gg. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
hh. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
ii. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
jj. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
kk. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
ll. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti;
mm. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong;
oo. Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu;

qq. Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan;
rr. Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman;
ss. Rencana Kerja Kecamatan Sebulu;
tt. Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak;
uu. Rencana Kerja Kecamatan Marang Kayu;
vv. Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa;
ww. Rencana Kerja Kecamatan Samboja;
xx. Rencana Kerja Kecamatan Anggana;
yy. Rencana Kerja Kecamatan Sanga-Sanga;
zz. Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun;
aaa. Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis;
bbb. Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai;
ccc. Rencana Kerja Kecamatan Kenohan;
ddd. Rencana Kerja kecamatan Kembang Janggut;
eee. Rencana Kerja Kecamatan Tabang;
fff. Rencana Kerja Kota Bangun Darat; dan
ggg. Rencana Kerja Samboja Barat.

(3) Renja-PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

Lampiran I	:	Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
Lampiran II	:	Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Lampiran III	:	Rencana Kerja Inspektorat;
Lampiran IV	:	Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Lampiran V	:	Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Lampiran VI	:	Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Lampiran VII	:	Rencana Kerja Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah;

Lampiran VIII	:	Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
Lampiran IX	:	Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Lampiran X	:	Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Lampiran XI	:	Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Lampiran XII	:	Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
Lampiran XIII	:	Rencana Kerja Dinas Sosial;
Lampiran XIV	:	Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
Lampiran XV	:	Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Lampiran XVI	:	Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
Lampiran XVII	:	Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
Lampiran XVIII	:	Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Lampiran XIX	:	Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Lampiran XX	:	Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
Lampiran XXI	:	Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
Lampiran XXII	:	Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Lampiran XXIII	:	Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
Lampiran XXIV	:	Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
Lampiran XXV	:	Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
Lampiran XXVI	:	Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
Lampiran XXVII	:	Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan;
Lampiran XXVIII	:	Rencana Kerja Dinas Perkebunan;
Lampiran XXIX	:	Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
Lampiran XXX	:	Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
Lampiran XXXI	:	Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
Lampiran XXXII	:	Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Lampiran XXXIII	:	Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Lampiran XXXIV	:	Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Lampiran XXXV	:	Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
Lampiran XXXVI	:	Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Lampiran XXXVII	:	Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
Lampiran XXXVIII	:	Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti;

Lampiran XXXIX	:	Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja;
Lampiran XL	:	Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong;
Lampiran XLI	:	Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang;
Lampiran XLII	:	Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu;
Lampiran XLIII	:	Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan;
Lampiran XLIV	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman;
Lampiran XLV	:	Rencana Kerja Kecamatan Sebulu;
Lampiran XLVI	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak;
Lampiran XLVII	:	Rencana Kerja Kecamatan Marang Kayu;
Lampiran XLVIII	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa;
Lampiran XLIX	:	Rencana Kerja Kecamatan Samboja;
Lampiran L	:	Rencana Kerja Kecamatan Anggana;
Lampiran LI	:	Rencana Kerja Kecamatan Sanga-Sanga;
Lampiran LII	:	Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun;
Lampiran LIII	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis;
Lampiran LIV	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai;
Lampiran LV	:	Rencana Kerja Kecamatan Kenohan;
Lampiran LVI	:	Rencana Kerja kecamatan Kembang Janggut;

Lampiran LVII	:	Rencana Kerja Kecamatan Tabang;
Lampiran LVIII	:	Rencana Kerja Kota Bangun Darat; dan
Lampiran LIX	:	Rencana Kerja Samboja Barat

BAB IV

PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 5

(1) Perubahan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
   c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada perubahan RKPD.

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Renja-PD Tahun 2026 dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda-BRIDA Lantai 4 Tenggarong
Website : http : //brida.kukarkab.go.id **E-mail** brida@kukarkab.go.id **Kode Pos 75511**

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P.90/SK-BRIDA/P1.1/818.1/4/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari APBD Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 yang dalam pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara lengkap, transparan dan akuntabilitas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2026 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. pegawai yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2026 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 Tahun 2016;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024;

Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD, Tanggal 05 April 2007, tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penataan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2010;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 682/SK-BUP/HK/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2026 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan susunan nama – nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2026 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, sebagai suatu tim yang solid, berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan dengan sebaik – baiknya serta penuh rasa tanggung jawab sesuai tugas masing – masing yang telah ditetapkan secara terpadu dan keseimbangan antara satu dengan yang lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 02 April 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BRIDA

MAMAN SETIAWAN, S.T., M.T
Pembina TK I (IV/b)

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan).
2. Kepala BAPPEDA Kebupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Masing – masing yang bersangkutan.
8. Pertinggal.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran	:	Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tentang	:	Tim Penyusun Dokumen RENJA Tahun 2026 Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025
Nomor	:	P.90/SK-BRIDA/P1.1/818.1/4/2025 Tanggal 02 April 2025

I.	Pengarah	:	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
II.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
III.	Ketua	:	Perencana Ahli Muda
IV	Anggota	:	1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan 3. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi 5. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 6. JP Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 02 April 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BRIDA

MAMAN SETIAWAN, S.T., M.T
Pembina TK I (IV/b)

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen ini merupakan tahapan akhir dari proses penyusunan Rencana Kerja BRIDA yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan strategis berbasis riset dan inovasi, guna mendukung visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Penyusunan rancangan akhir ini telah melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari koordinasi internal, konsultasi publik, hingga sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait, agar setiap program yang dihasilkan relevan dengan prioritas pembangunan daerah dan selaras dengan kebijakan nasional.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BRIDA, para pemangku kepentingan, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan selama proses penyusunan dokumen ini. Semoga rancangan akhir ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas BRIDA secara efektif, inovatif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kutai Kartanegara.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan bagi kita semua dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih baik di masa depan.

Tenggarong, Agustus 2025



DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Surat Keputusan Kepala BRIDA Kab. Kutai Kartanegara ii
Kata Pengantar vii
Daftar Isi viii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra PD 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19
2.4 Review Terhadap Ranhir Rencana Kerja RKPD Tahun 2026 26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 37
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah 37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 38

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41
4.1 Program dan Kegiatan 41

BAB V. PENUTUP 52

BAB I
PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan BRIDA merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional di bidang penguatan riset dan inovasi yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan daya saing daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan BRIDA Kabupaten dimaksudkan untuk menjadi penghubung (bridging institution) antara pemerintah daerah, dunia akademik, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga hasil-hasil penelitian dan inovasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan publik maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Kerja BRIDA Kabupaten ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis BRIDA, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta arah kebijakan pembangunan nasional. Renja ini memuat program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas di bidang riset dan inovasi, yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisis isu strategis, serta kebutuhan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (Renja BRIDA) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Strategis BRIDA, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional di bidang Riset dan Inovasi. Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah, BRIDA berperan penting dalam menyediakan basis pengetahuan yang akurat, mendorong penerapan teknologi tepat guna, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisis isu strategis daerah, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Renja BRIDA disusun secara partisipatif melalui koordinasi lintas perangkat daerah, forum konsultasi publik, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, mampu memberikan solusi berbasis riset, serta mendorong lahirnya inovasi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahtera.

Rencana akhir Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten/Kota disusun sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Rencana ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BRIDA pada periode tahun anggaran berjalan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi capaian kinerja lembaga.

Seluruh program diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data ilmiah, mendorong kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, serta memfasilitasi inovasi masyarakat yang berdaya guna dan berkelanjutan.

Penyusunan rencana akhir ini mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja utama, serta tantangan strategis di bidang riset dan inovasi. Target yang ditetapkan meliputi peningkatan jumlah penelitian terapan, penerapan inovasi inovasi daerah melalui pendampingan.

Dengan adanya rencana akhir ini, diharapkan BRIDA dapat berperan optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, pelayanan publik yang lebih efektif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rancangan (Akhir) Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagai mana telah ubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2026 ;
14. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komite Inovasi Nasional;14.
15. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
18. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-645/BAPP/065.11/03/2025 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/36/SJ Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 tahun 2021,Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 01 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026.

b. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

a. Mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara kedalam Rencana Kegiatan Pembangunan melalui Kutai Kartanegara IDAMAN TERBAIK.
b. Sebagai acuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Kartanegara sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misinya.
c. Merumuskan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKA DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Terhadap Hasil Evaluasi pelaksanaan RENJA BRIDA Kabupaten Kutai Kartanergara tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 yang sudah terinput pada Aplikasi E-Pantau bahwa yang sudah terealisasi sesuai dengan rencana dapat disampaikan sebagai berikut :
   a). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, terdiri dari 7 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Secara capaian target kinerja tercapai sebesar 100%.
   b). Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan secara umum terget kinerja tercapai 100%.
   c). Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan secara umum terget kinerja tercapai 100%.
   d). Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan secara umum terget kinerja tercapai 100%.
   e). Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi secara umum terget kinerja tercapai 100%.

2. Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2026 (n), sehingga realisasi capaian target Renja masih sebatas perkiraan. Evaluasi realisasi capaian target Renja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra PD (n-1 dan n-2), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan kerja yang telah direncanakan, Sehingga Brida Kab. Kukar dapat mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, selain itu juga dapat mengetahui program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

3. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kendala kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator masukan (input), Keluaran (output) dan hasil (outcome). Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melihat secara lebih jelas tentang hal hal yang dipaparkan diatas, dapat perhatikan sebagaimana disajikan pada tabel data sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan
Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
										Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**95**	**62,65**	**84**	**90,45**	108%	**87 (A)**	**90,45**	95%
		5	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	55	**11**	**11**	11	100%	**11**	**33**	60%
		5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100%	2	**6**	60%
		5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	8	8	8	100%	8	**24**	60%
		5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1	1	1	100%	1	**3**	60%
		5	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	35	7	7	**7**	100%	**7**	**21**	**60%**
		5	05	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5450	1090	1090	1002	92%	1090	**3182**	58%
		5	05	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	30	6	6	6	100%	6	**18**	60%
		5	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	35	7	7	7	100%	**7**	**21**	**60%**
		5	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30	6	6	6	100%	6	**18**	60%
		5	05	01	2.03	06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	5	1	1	1	100%	1	**3**	60%
		5	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	30	**6**	6	**6**	100%	**6**	**18**	**60%**
		2	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	28	10	4	40%	10	**42**	84%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	5	5	5	100%	5	**15**	60%
5	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan administrasi umum**	35	**7**	**7**	**7**	100%	7	**21**	**60%**
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75	22	2	2	100%	31	**55**	73%
5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55	14	2	2	100%	11	**27**	49%
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	5	3	3	100%	4	**12**	75%
5	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	0	2	0	0%	2	**2**	20%
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2145	417	143	140	98%	256	**813**	38%
5	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	185	37	37	37	100%	37	**111**	60%
5	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100%	1	**3**	60%
5	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	60	**12**	**12**	**12**	100%	12	**36**	**60%**
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	48	48	48	100%	48	**144**	60%
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1920	384	384	384	100%	384	**1152**	60%
5	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	1215	**244**	243	**243**	100%	243	**730**	**60%**
5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160	32	31	26	84%	31	**89**	56%
5	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1060	212	212	212	100%	212	**636**	60%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**100**	**100**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	**100**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	7	**4**	**7**	7	100%	**1**	**12**	**171%**
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1		3	3	100%		**3**	300%
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1		6	6	100%		**6**	600%
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1					1	**1**	100%
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	3					**3**	300%
5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1							
5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian tentang pengembangan bidang badan usaha milik desa	1	1					**1**	100%
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1							

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	5	05	02		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan**	**100**	**100**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	**100%**
	5	05	02	2.02	**Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan**	**10**	**1**	**10**	**10**	100%	**3**	**14**	**140%**
	5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1		1	1	100%		**1**	100%
	5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	1	1				1	**2**	200%
	5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1							
	5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1							
	5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	5		9	9	100%	2	**11**	220%
	5	05	02	2.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1							
	5	05	02		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	**100%**
	5	**05**	**02**	**2.03**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**5**	**1**	**1**	**1**	100%	**1**	**3**	**60%**
	5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1		1	1	100%		**1**	100%
	5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1		1	1	100%		**1**	100%
	5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1					1	**1**	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja-PD tahun (2022)	Realisasi Renja-PD tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	1	1	1	100%		2	200%
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1							
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1							
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	**100%**
5	**05**	**02**	**2.04**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi**	**5**	**2**	**2**	**2**	100%	**1**	**5**	**100%**
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1					1	1	100%
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1							
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	1	1	100%		2	200%
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1					1	100%
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1		1	1	100%		1	100%

Tenggarong, 3 Agustus 2023

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala,

Maman Setiawan, S.T.,M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19701005 199903 1 011

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sesuai dengan peraturan – peraturan yang ada Bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah yang merupakan Transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan yang melaksanakan urusan penunjang pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam penelitian dan pengembangan sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2026. Keberhasilan pencapaian sasaran akan diketahui berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan sasaran telah terlaksana.

“ Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi daerah “

Adapun indikator sasaran yang ditetapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan
2. Indeks Inovasi Daerah

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, maka pada Renstra tahun 2021-2026 Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sebelumnya bernama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dirumuskanlah tujuan, sasaran, dan program sebagai alat ukur keberhasilan perangkat daerah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	CARA HITUNG
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah			Persentase Rekomendasi yang termanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan daerah	Jumlah Rekomendasi yang menjadi rujukan Kepala Daerah / Sekretaris Daerah / Jumlah rekomendasi Yang dihasilkan X 100
2		Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan Inovasi Daerah		Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Kelitbangan yang Termanfaatkan oleh Stakeholder / Jumlah Kelitbangan Yang dihasilkan X 100
				Indeks Inovasi Daerah	skor indeks inovasi dikeluarkan oleh kemendagri
3			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai dikeluarkan oleh Inspektorat
4			Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan / Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang dihasilkan X100
				Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Sosial Dan Kependudukan yang termanfaatkan / Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang dihasilkan X100
				Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang termanfaatkan / Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang dihasilkan X100
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Jumlah OPD yang memiliki Inovasi dalam tahun perencanaan / Jumlah OPD di Pemerintahan Kutai Kartanegara X100

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran maka perlu menjabarkan Definisi Operasional dari Indikator tersebut, ada pun definisi operasional adalah sebagai berikut :

- Definisi Operasional Pemanfaatan hasil Kelitbangan adalah Kemanfaatan suatu hasil Kelitbangan (rekomendasi) untuk membuat pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, meningkatkan produktivitas, efektivitas dan meningkatkan kinerja pekerjaan, Pemanfaatan tidak serta merta digunakan pada saat rekomendasi dihasilkan dengan catatan, bisa saja dua atau tiga tahun berjalan selama belum ada rekomendasi baru yang dihasilkan dari judul/tema riset yang sama sebagai rujukan dalam membuat kebijakan yang meyesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu yang berkembang.

Contoh Definisi Pemanfaatan :

Kegiatan Tahun 2021	Hasil dan Rekomendasi	Masa Renstra 2021-2026	
		PD Penerima Manfaat	Tahun
Bidang Pemerintahan dan pengkajian peraturan			
Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Syarat Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, SDM, SDA memenuhi kriteria dan syarat pemekaran wilayah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memanfaatkan dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mengajukan Usulan Ke DPRD Kukar dan selanjutnya DPRD Kukar telah mensyahkan sesuai Perda Nomor : untuk disyahkan menjadi 2 kecamatan baru	2024

Definisi operasional Indeks Inovasi Daerah adalah penilaian yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan cara hitung IID = Skor total : Skor total maksimum x 100 dengan keterangan skor total maksimum diperoleh dari penjumlahan skor maksimal indikator satuan pemerintah daerah (SPD) dengan skor maksimal indikator satuan inovasi daerah (SID). Skor total maksimum adalah 250 dan skala IID adalah 0 s.d 100. Berdasarkan hasil penilaian terhadap penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud akan digunakan oleh Menteri Dalam Negeri untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah Dua sasaran dan indikator tersebut telah dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang dihasilkan sampai dengan Tahun ke 5 (lima) Renstra Tahun 2025-2029 pada Tabel T-C. 30 sebagai berikut.

Tabel TC - 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	**Persentase Rekomendasi yang termanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan daerah**			**28,6**	**33,4**	**100**	**100**	**28,6**	**33,3**	**100**	**100**	adanya perubahan target pada indikator tujuan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan sudah menjadi kesepakatan bersama dengan Bappeda
2	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
3	**Indeks Inovasi Daerah**			**36,64**	**41,38**	**55,85**	**57**	**41,38**	**55,85**	**59,93**	**60,01**	adanya perubahan target pada indikator sasaran ke-2 hasil evaluasi tahun sebelumnya dan sudah menjadi kesepakatan bersama dengan Bappeda
4	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**			**81**	**84**	**87**	**91**	**62,65**	**90,45**	**88**	**91**	
5	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	
6	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	
7	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	
8	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	6 Dukumen	
9	Jumlah Pelayanan administrasi umum			7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	7 Pelayanan	
10	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			432 Orang / Bulan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	397 Orang / Bulan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	
11	Jumlah Barang Milik Daerah			244 Unit	243 Unit	243 Unit	243 Unit	244 Unit	243 Unit	243 Unit	243 Unit	
12	**Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
13	**Jumlah Dokumen cakupan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**			**5 Laporan**	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**4 Laporan**	9 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
14	**Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
15	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan**			**1 Dokumen**	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**1 Dokumen**	10 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
16	**Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	-	**100**	**100**	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD , Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 01 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah bahwa Brida merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dibidang Riset dan Inovasi Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegera.

   Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2025 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka BRIDA mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 tersebut, BRIDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

   b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;

e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;

f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;

h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

i. Pelaksanaan administrasi badan; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

2. Menentukan permasalahan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan Renja PD tahun 2024, serta capaian kinerja Renstra PD sampai dengan tahun berjalan, yaitu :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimalnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi	Belum tersediannya rekomendasi yang menjadi salah satu bahan penyusunan kebijakan sesuai kebutuhan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai Renstra tidak seluruhnya dapat difasilitasi dalam hal penganggaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Rekomendasi yang dihasilkan tidak semuanya termanfaatkan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan yang disusun belum sepenuhnya terkoordinasi dengan kebutuhan perangkat daerah lainnya
		Jumlah Jabatan Fungsional Peneliti yang tersedia belum sesuaidengan kebutuhan Jabatan Fungsional peneliti berdasarkan kepakaran	Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti berkurang dikarenakan terjadi mutasi / pindah ke jabatan strutural
			Rendahnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional peneliti
			Peningkatan Kapasitas kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya dapat difasilitasi (Peningkatan SDM)
2.	Terbatasnya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung kelitbangan atau referensi perumusan kebijakan yang diperlukan pemengku kepentingan	Publikasi ilmiah yang ada belum memenuhi standar akreditasi secara nasional	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan publikasi mandiri dan berkala

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum termanfaatkannya publikasi mandiri dan berkala oleh masyarakat	Kurangnya sosialisasi manfaat publikasi mandiri dan berkala

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional/ internasional, SPM dan MDGs. Penyebab tidak tercapainya target kinerja utama dan belanja utama Perangkat Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah akan berdampak kepada Internal maupun eksternal Badan Riset dan Inovasi Daerah, pada analisis risiko terdapat penyebab risiko dan skala risiko sehingga akan menghasilkan area dampak seperti Beban keuangan daerah, Penurunan reputasi, Sanksi pidana, perdata, dan/atau administrasi, Kecelakaan kerja, Ganggugan terhadap layanan organisasi dan Penurunan kinerja, dengan Level dampak seperti tidak signifikan (1), minor (2), moderat (3), signifikan (4), sangat signifikan (5).Untuk mengetahui level dampak tersebut harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi atas pengendalian intern yang telah dibuat seperti pada Surat Instruksi dan Surat Edaran Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah tersebut serta pengendalian yang lain yang mendukung atas evaluasi tersebut.

Dari berbagai opsi penanganan risiko yang telah dipilih memiliki dampak risiko seperti pada surat edaran Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut terdapat area dampak yang harus dilakukan rencana tindak pengendalian yang dibuatkan secara terpisah dari manajemen risiko. Untuk mencapai tujuan dalam kegiatan dan capaian tujuan organisasi terhadap pemenuhan target yang diperjanjikan perlu dikomunikasi dan dikonsultasikan antar kegiatan dan pimpinan, komunikasi dan konsultasi tersebut dapat berupa :

1. Rapat berkala Kelitbangan dan memaksimalkan Tim Kelitbangan ;
2. Rapat insidentil ;

3. Focused group discussion ; dan
4. Forum pengelola risiko.
5. Pelaksanaan Pra seminar Hasil dan Seminar Hasil

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah :

1. *Good governance* yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan dan implementasikan kepada wujud pelaksanaan yang lebih nyata dan bertanggungjawab;
2. Tuntutan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih 2025-2029 yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 dalam bentuk 23 program Dedikasi belum maksimal di laksanakan oleh PD diantaranya ;
   A. Program Pertanian berbasis Kawasan
   B. Program Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Pangan
   C. Program usaha Kecil dengan pinjaman tanpa bunga (0 %)
   D. Program Desa Ramah Lingkungan
   E. Program Kukar Peduli Lingkungan
3. Tuntutan *stakeholders* terhadap publikasi hasil litbang;
4. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal;
5. Hasil-hasil *I outcome* penelitian yang belum semua dimanfaatkan oleh PD yang ada sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
6. Belum tersedianya laboratorium iptek dan riset litbang daerah;

A. Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah :

Sesuai RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, Visi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Penjabaran MISI Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut :

MISI

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sector pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan Pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

1) **Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara,** prioritas Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Review Perda dan Perbup yang tidak sesuai dengan perkembangan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan/Desa.

2) **Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial**, prioritas Kegiatan dibidang Sosial dan Kependudukan (Survey Kepuasan Publik, Pengembangan Situs Kerajaan dan Budaya, Kajian Penurunan Angka Kemiskinan, Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan dan kesehatan Peningkatan Kualitas tenaga kerja lokal).

3) **Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif** Prioritas kegiatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan (Strategis Peningkatan PAD, Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat, Kajian Optimalisasi Hilirisasi produk Pertanian, Perkebunan dan Pangan)

4) **Terbaikdalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan** Prioritas di bidang Sosial dan Kependudukan serta bidang Ekonomi dan Pembangunan (Indeks Kualitas layanan infrastuktur Dasar menyangkut Konektivitas sarana dan pasarana dasar layanan publik antar wilayah, keterlibatan pekerja lokal dalam pembangunan, optimalisasi pembangunan kawasan wisata, desa ramah lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan)

5) **Terbaik dalam mewujudkan pengembangan Pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal** prioritas dibidang Inovasi dan Teknologi (penguatan Inovasi Daerah, pemanfaatan tehnologi tepat guna, optimalisasi pemanfaatan lahan eks Tambang, Inventarisasi, sosialisasi dan pedaftaran atas karya seni, karya budaya, kuliner ke Kemenkumham untuk mendapat Hak Atas Kekayaan Intelektual)

B. Formulasi Isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

1) **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**
   12 (dua belas) Sub Kegiatan
2) **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**
   5 (lima) Sub Kegiatan
3) **Penelitian dan Pengembangan di Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan**
   5 (lima) Sub Kegaiatan
4) **Pengembangan Inovasi dan Teknologi**
   5 (lima) Sub Kegiatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan PD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel, sehingga aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan salah satu PD yang berperan strategis dalam pemberian rekomendasi terhadap pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembangunan Kutai Kartanegara dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa dan kecamatan juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi penelitian, kajian dan pengembangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah membutuhkan sinergitas antara semua PD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik alokasi anggaran untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Adapun pagu anggaran pada Rancangan awal sebesar Rp 29.600.000.000,-.,- Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melihat Badan Riset dan Inovasi Daerah secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel TC-31 Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Nilai Sakip Perangkat Daerah	**91 Nilai**	14.150.000.000,-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**91 Nilai**	**12.371.429.048**	
1.1	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11** Dokumen	750.000.000,-	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Dokumen**	**273.600.000**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BALITBANGDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BRIDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	103.600.000	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	70.000.000	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	BALITBANGDA	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**7** Dokumen	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	BALITBANGDA	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**7 Dokumen**	**10.098.231.787**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BALITBANGDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1090 Orang / Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BALITBANGDA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1120 Orang / Bulan	9.951.441.787	Adanya penambahan PNS dari Dinas ESDM sebanyak 19 orang
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	6 Laporan		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	146.790.000	
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	BALITBANGDA	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**7** Dokumen		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	BALITBANGDA	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**90.000.000**	
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	50.000.000	
1.3.2	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.000.000	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	BALITBANGDA	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	6	Dokumen	**155.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	BRIDA	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**6 Dokumen**	**305.000.000**	
1.4.1							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BRIDA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	150.000.000	Permendagri no 11 tahun 2020, Aparatur BRIDA sudah lebih dari 5 tahun belum pernah mengadakan pengadaan pakaian dinas
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	95.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BRIDA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	95.000.000	
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BALITBANGDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	60.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BRIDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	60.000.000	
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	BALITBANGDA	**Jumlah Pelayanan administrasi umum**	7	Pelayanan	**500.000.000,**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	BALITBANGDA	**Jumlah Pelayanan administrasi umum**	7 Pelayanan	**662.736.962**	
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BALITBANGDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BALITBANGDA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	71.081.000	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BALITBANGDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BALITBANGDA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	124.450.000	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BALITBANGDA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BALITBANGDA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.002.325	
1.5.4	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	45.883.637	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	Laporan	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	300.000.000	
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37	Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37 Dokumen	61.320.000	
1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BALITBANGDA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000	
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	BALITBANGDA	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	12	Bulan	700.000.000,-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	BALITBANGDA	**Jumlah Pelaporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 Bulan	**806.860.299**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.915.728	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BALITBANGDA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	747.944.571	Penambahan THL dari Pelimpahan Dinas SDM sebanyak 5 orang
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	BALITBANGDA	**Jumlah Barang Milik Daerah**	243	Unit	**500.000.000,-**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	BALITBANGDA	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	243 Unit	**135.000.000**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	65.000.000	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212	Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212 Unit	70.000.000	
2	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		**1. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** **2. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial dan Kependudukan** **3. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan** **4. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi**	**100**	**Persen**	Rp	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		**1. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** **2. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial dan Kependudukan** **3. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan** **4. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi**	**100**	Rp 11.884.210.000,00	
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	1	**Dokumen**	4.700.000.000,-	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**1 Dokumen**	**1.949.660.000**	
2.1.1							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	400.000.000	penelaahan saran dan tanggapan dari Prof. Ince Raden(Unikarta) dalam forum konsultasi publik dan Pokir DPRD, berisi 2 Tema Kajian dengan Judul : 1. Review Perda tentang Perlindungan lahan pertanian 2. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan (Lanjutan pemekaran kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Loa Kulu) Untuk mensuport Kinerja OPD antara lain : 1. Distanak 2. DKP 3. Disbun 4. DisPMD 5. Kec. TGR Seberang 6. Kec. Loa Kulu program Dedikasi : 1. Program Pertanian berbasis kawasan 2. Program Pemantapan Konektivitas Wilayah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	Laporan	125.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2 Laporan	500.000.000	1. Review Peraturan Bupati tentang Tata Kelola BUMDes atas Destinasi wisata dan Desa Wisata Berwawasan lingkungan, hal ini sangat penting agar BUMDes mampu bersaing dan kompetisi sebagai penyedia Barang dan Jasa 2. Kajian pemetaan konflik tanah dan efektifitas administrasi pertanahan untuk mensuport kinrja PD 1. BPMD 2. Disperindag 3. Dinas Koperasi dan UMKM Program Dedikasi : Program Usaha Kecil Idaman Program Kukar Kreatif Idaman
2.1.3							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	509.660.000	1. Kajian Determinan permasalahan program fasilitasi perumahan rakyat 2. Fasilitasi pemanfaatan tanah, gedung aset daerah untuk disewakan kepada pihak ketiga sebagai salah satu PAD 3. Evaluasi sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa (ADD) terhadap pembangunan dan kemajuan Desa Untuk mensuport PD : 1. BPKAD 2. BKPSDM 3. DPPPA
2.1.4							Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	140.000.000	1. Penerbitan buletin dan jurnal ilmiah 2. Riset cepat dan FGD
2.1.5							Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	400.000.000	penelaahan saran dan tanggapan dari hero suprapto(Unikarta) dalam forum konsultasi publik, Berisi 2 Tema Kajian dengan judul : 1. Fasilitasi Pembuatan Perbup Insentif bagi Industri yang bergerak disektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Pangan 2. Evaluasi Kebijakan legal audit atas Produk Hukum Daerah Kab.Kukar yang terkait dengan 23 program Kukar idaman diantaranya : 1. Program Hilirisasi Produk Pertanian 2. Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA) yang bertujuan untuk mensuport Kinerja OPD antara lain : 1. Disnakertrans 2. Distanak 3. DPMPTSP 4. Disbun 5. Disperindag 6. Diskop dan UMKM Program Dedikasi : Program Hilirisasi Produk Pertanian Program Pembangunan Pertanian Berbasis kawasan
2.2	**penelitian dan pengembangan daerah bidang Sosial Dan Kependudukan**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan**	**2**	**Dokumen**	3.000.000.000,-	**penelitian dan pengembangan daerah bidang Sosial Dan Kependudukan**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan**	**2 Dokumen**	**3.750.000.000**	
2.2.1							Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	800.000.000	Lanjutan kajian determinan kemiskinan dan penanggulangannya perspektif pendidikan, untuk mensuport PD : 1. Diknas 2. Dinsos 3. Disnakertrans Program Dedikasi : Program Kukar Bebaya

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen	500.000.000	Kajian Determinan terhadap penyakit masyarakat (perempuan dan Anak), usulan dari DPPPA
2.2.2							Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	2 Dokumen	600.000.000	1. Kajian pengaruh APK dan APM terhadap angka pengangguran terbuka 2. Lanjutan Kajian Kerajaan Kutai Ing Martadipura di desa Jembayan Kec. Loa Kulu. Untuk mensuport PD : 1. Diknas 2. Dinas Pariwisata 3. Dinas Perkim Program Dedikasi : Kukar Bebaya
							Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	150.000.000	Kajian analisis dampak pelaksanaan event pariwisata
2.2.3							Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	450.000.000	Survei angka harapan hidup (Terkait indeks kesehatan) 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial 3. Diknas Program Dedikasi : Program Peduli Kesehatan
2.2.4	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	Dokumen		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	250.000.000	Kajian pengaruh pembangunan IKN terhadap daya serap dan peningkatan ketenagakerjaaan khususnya tenaga kerja lokal untuk mensuport PD : 1. Disnakertrans
2.2.5	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	1	Dokumen		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil penelitian tentang pengembangan partisipasi masyarakat	1 Dokumen	1.000.000.000	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengukur sejauh mana kineja PD terhadap kepuasan pelayanan publik. 2. Indeks Kebahagian 3. Indeks Infrastruktur Untuk mensuport PD. : 1. Seluruh PD di Kab Kukar 2. Seluruh UPTD di Kab. Kukar
2.3	penelitian dan pengembangan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1**	**Dokumen**	**3.850.000.000**	penelitian dan pengembangan daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1 Dokumen**	**3.053.820.000**	
2.3.1							Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	400.000.000	1. Fasilitasi Tataniaga produksi usaha koperasi dan UKM di Ibukota negara dan pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. 2. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program usaha kecil idaman (Kredit Kukar Idaman) penelaahan terhadap saran Dr. Agung Satrio N (UGM) dalam forum konsultasi publik untuk mensuport PD : 1. Disperindag 2. Diskop dan UMKM 3. Dinas Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.3.2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	125.000.000	Kajian potensi kredit kukar idaman dengan bunga 0 % terhadap tumbuh sentra-sentra baru perekonomian untuk mensuport PD : 1. Disperindag 2. Diskop UMKM Program Dedikasi Program usaha kecil Idaman
2.3.3							Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	6 dokumen	1.628.820.000	1.Kajian efektifitas fasilitasi sarana produksi komoditas pertanian dan perkebunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. 2. Fasilitasi Interkonekting lumbung pangan masyarakat (LPM) dengan pelaku/ketingkat pasar. 3. Pengembangan basis data kelitbangan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. 4. Kajian tataniaga pemasaran hasil pertanian padi/beras dikabupaten Kutai Kartanegara. 5. Studi kelayakan pembangunan industri pakan ternak skala kecil berbasis potensi bahan baku lokal. 6. Penyusunan Dokumen Indeks Nilai Tukar Petani Tindak lanjut terhadap saran dan tanggapan dari hero suprapto (unikarta) dan penelaahan terhadap saran Prof ince raden (Unikarta) dalam forum konsultasi publik : program dedikasi : 1. Program Pembangunan pertanian berbasis Kawasan
2.3.4							Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasilPenelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	350.000.000	1. Penguatan kapasitas kelembagaan Nelayan dalam rangka Peningkatan NTN. 2. Penyusunan Dokumen Indeks Nilai Tukar Nelayan. Tindak lanjut terhadap saran dan tanggapan dari hero suprapto (unikarta) dalam forum konsultasi publik untuk mensuport PD. 1. DKP
2.3.5							Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	300.000.000	Kajian Kualitas anak sungai Mahakam sebagai bahan baku air bersih untuk mensuport PD. 1. PDAM 2. DLHK
2.3.6							Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	250.000.000	Kajian Perumahan Rakyat dalam rangka mitra IKN bagi Pengusaha UKM untuk mensuport PD : 1. Dinas Perkim 2. DPTR program dedikasi : Program Fasilitasi Perumahan Rakyat
2.4	penelitian dan pengembangan daerah bidang Inovasi dan Teknologi	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi**	**1**	**Dokumen**	3.900.000.000,-	penelitian dan pengembangan daerah bidang Inovasi dan Teknologi	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi**	**1 Dokumen**	**3.130.730.000**	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan sistem kepemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja.

Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun PD di Kabupaten Kutai Kartanegara. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi serta isu-isu aktual dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perda No 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025.

Pada Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah telah dilakukan diskusi dan pembahasan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil kesepakatan tersebut ada beberapa usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan dari akademisi/kelompok masyarakat/stakeholder terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Usulan-usulan tersebut dapat dilihat pada Tabel TC-32 Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah: Badan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
5		1. Tingginya kasus sengketa kepemilikan lahan terutama disektor perumahan, perkebunan dan pertambangan 2. perlu tindak lanjut hasil riset cepat pemekaran kecamatan Tenggarong Seberang dan kecamatan Loa Kulu	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	**Paket Pekerjaan:** 1. Review Perda tentang Perlindungan lahan pertanian 2. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan (Lanjutan pemekaran kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Loa Kulu)
6		1. BUMDes belum mampu bersaing dalam mengikuti pelelangan dikarenakan Bentuk/Wujud BUMDes belum jelas. 2. Kurangnya minat investor dibidang Pertanian, Perkebunan dikarenakan permasalahan lahan.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2 Laporan	**Paket Pekerjaan:** 1. Review Peraturan Bupati tentang Tata Kelola BUMDes atas Destinasi wisata dan Desa Wisata Berwawasan lingkungan 2. Kajian pemetaan konflik tanah dan efektifitas administrasi pertanahan
7		1. Kurangnya minat investor dibidang Perumahan dan Pemukiman dan kurang termanfaatkannya program dedikasi Program fasilitasi Perumahan Rakyat. 2. Aset tanah Pemkab Kukar belum sepenuhnya termanfaatkan guna menghasilkan PAD. 3. Tata kelola Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) belum sepenuhnya direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	**Paket Pekerjaan:** 1. Kajian Determinan permasalahan program fasilitasi perumahan rakyat 2. Fasilitasi pemanfaatan tanah, gedung aset daerah untuk disewakan kepada pihak ketiga sebagai salah satu PAD 3. Evaluasi sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa (ADD) terhadap pembangunan dan kemajuan Desa
8		belum terfasilitasinya riset cepat dalam menindaklanjuti isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat, belum terfasilitasinya Peningkatan Kafasitas dan Kapabilitas peneliti berupa kredit poin, belum terfasilitasinya publikasi hasil-hasil kelitbangan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	11 Laporan	**Paket Pekerjaan:** 1. FGD 2. Riset Cepat 3. Penerbitan Buletin Ilmiah
9		1. Kurangnya minat investor dikarenakan Belum ada insentif atau kemudahan berinvestasi untuk bidang Pertanian, Perikanan, peternakan dan pangan. 2. terdapat 79 Klaster Perda dan Perbup yang telah tidak sesuai dengan perubahan zaman.	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	**Paket Pekerjaan:** 1. Fasilitasi Pembuatan Perbup Insentif bagi Industri yang bergerak disektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Pangan 2. Evaluasi Kebijakan legal audit atas Produk Hukum Daerah Kab.Kukar
10		hasil pembangunan tahun 2024 belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan dan masih rendahnya capaian penurunan angka kemiskinan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** 1. Lanjutan kajian determinan kemiskinan dan penanggulangannya perspektif pendidikan
11		tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak di kabupaten Kukar sampai dengan tanggal 25 Maret 2025 sudah mencapai 28 Kasus aduan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** 1. Kajian Determinan terhadap penyakit masyarakat (perempuan dan Anak)

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
12		1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang berdampak pada tingginya angka putus sekolah SD dan SLTP berdampak pada tingginya angka pengangguran dan Kemiskinan. 2. Situs karajaan Kutai Ing Martadipura didesa Jembayan berada diwilayah pemukinan dikhawatirkan akan hilang	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	2 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Kajian pengaruh APK dan APM terhadap angka pengangguran terbuka **2.** Lanjutan Kajian Kerajaan Kutai Ing Martadipura di desa Jembayan Kec. Loa Kulu
13		Angak Harapan Hidup (AHH) Kab. Kukar tahun 2024 rata-rata 72,65 Tahun sementara Provinsi Kaltim 74,62 tahun, Nasional 73.5 tahun atau urutan 8 dari Kab./Kota di Kaltim. Tingkat Kesehatan Kab. Kukar berada di urutan 6 sekaltim	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Survei angka/umur harapan hidup
14		Keberadaan IKN masih jauh dari harapan dalam penyerapan tenaga kerja Lokal, hal ini apakah dikarenakan kompetensi tenaga kerja lokal yang rendah atau upah tenaga kerja dari luar lebih rendah dari tuntutan upah tenaga kerja lokal atau ada faktor penyebab lainnya	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Kajian pengaruh pembangunan IKN terhadap daya serap dan peningkatan ketenagakerjaaan khususnya tenaga kerja lokal
15		1. sampai saat ini belum ada road map tentang sentra perekonomian baru dikarenakan Kab. Kukar menjadi mitra IKN. 2. Pemanfaatan Program dedikasi program usaha kecil idaman dikarenakan kurangnya sosialisasi pemanfaatan program tersebut	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Fasilitasi Tataniaga produksi usaha koperasi dan UKM di Ibukota negara dan pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru **2.** Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program usaha kecil idaman (Kredit Kukar Idaman)
16		1. Survey tengtang NTP Kab. Kukar terakhir dilakukan pada tahun 2019 2. belum ada interkonekting dari lahan pertanian dengan LPM. 3. PD belum secara berkala dan mandiri melakukan PDRB. 4. Belum maksimalnya tentang Tataniaga pemasaran hasil pertanian khususnya Padi dan Beras. 5. Banyaknya potensi yang dimiliki kecamatan samboja maupun samboja barat baik dibidang sosial maupun ekonomi yang perlu dipetakan untuk mempermudah perencanaan pemberdayaan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	6 dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Evaluasi kebijakan subsidi untuk peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dalam rangka nilai tukar petani **2.** fasilitasi interkonekting dari lumbung pertanian ketingkat pasar **3.** Pengembangan Basis Data Kelitbangan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan **4.** Kajian Tataniaga pemasaran hasil pertanian padi/beras dikabupaten kutai kartanegara **5.** Kajian Pemetaan Sosial Ekonomi masyarakat dalam perencanaan pemberdayaan petani, perkebunan dan peternakan dikecamatan samboja barat **6.** Kajian Pemetaan Sosial Ekonomi masyarakat dalam perencanaan pemberdayaan petani, perkebunan dan peternakan dikecamatan samboja
17		Petani dan Nelayan kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar solar	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasilPenelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Nilai Tukar Nelayan (NTN)

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
18		kualitas air dianak sungai makahakam saat ini sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan limbah bahan kimia yang dibuang secara langsung ke anak sungai	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Kajian Kualitas anak sungai Mahakam sebagai bahan baku air bersih
19		Program dedikasi Fasilitasi Perumahan rakyat belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh investor pengembang pemukiman dan masih kurangnya sosialisasi	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Kajian Perumahan Rakyat dalam rangka mitra IKN bagi Pengusaha UKM
20		1. kurangnya Pemanfaatan tehnologi tepat guna mengakibatkan rendahnya hasil produksi dan tingginya biaya produksi. 2. Anak sungai mahakam didesa muara Enggelam sangat efektif dalam budidaya perikanan dan mempunyai potensi yang mampu mengawetkan produk olahan kayu tetapi 3. Kurang dimanfaatkannya tehnologi terintegrasi mengakibatkan biaya operasional yang tinggi. kurangnya pengetahuan tidak termanfaatkan secara maksimal 4. belum termanfaatkannya tehnologi disektor hulu berakibat Hilirisasi produk pertanian dan perkebunan masih terhambat. 5. Mahalnya hanga Pestisida, Herbisida. 6. Terdapat 13 Kultifar yang sudah lolos uji kematangan dan terdapat 30 jenis padi lokal unggul yang perlu di uji untuk menjadi Kultifar 7. belum termanfaatkannya secara maksimal tanaman endemik khas Kab. Kukar untuk bahan Kosmetik	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	7 Dokumen	**Paket Pekerjaan:** **1.** Tehnologi tepat Guna untuk Peningkatan Kualitas lahan Pertanian **2.** Implementasi Sceince Technopark **3.** Fasilitasi tehnologi terintegrasi dibidang pertanian, perkebunan dan Pangan **4.** Fasilitasi tehnologi disektor hulu **5.** Fasilitasi Pemanfaatan racun upas **6.** Fasilitasi Pemutihan 13 Kultifar Padi unggul **7.** Fasilitasi pemanfaatan buah lokal sebagai bahan kosmetik
21		1. Pada tahun 2022 peringkat Kab. Kukar diposisi 77 Kab Inovatif 2. Kurangnya minat Kaum Milenial berusaha dibidang pertanian. 3. Belum semua PD membuat inovasi sesuai dengan perjanjian kinerja, satu PD satu Inovasi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	**Paket Pekerjaan:** **1.** Pekan inovasi kaum milenial bidang pertanian **2.** Pekan inovasi daerah
22		Produk Karya seni khas, hak cipta Karya seni, Lambang Budaya, Adat istiadat belum sepenuh terinventarisir serta belum didaftarkan pada Kementerian/Lembaga	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	**Paket Pekerjaan:** **1.** Inventarisasi dan Pendaftaran haki

Tenggarong, 3 Agustus 2023

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala,

Maman Setiawan, S.T.,M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19701005 199903 1 011

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agar tercapainya sinergitas kegiatan Kelitbangan serta *outcome* yang luas, maka penyusunan rencana strategis BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara tetap memperhatikan rencana strategis Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai ujung tombak pengembangan dunia Kelitbangan di tanah air serta tetap memperhatikan rencana strategis Provinsi Kalimantan Timur maupun rencana strategis Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam upaya peningkatan pembangunan iptek nasional dan perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting karena akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya dalam menentukan Kebijakan yang akan diambil Pemerintah Daerah.

Berdasarkan rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2020-2026, maka pembangunan iptek ke depan harus diarahkan kepada Meningkatnya Produktivitas Invensi dan Inovasi untuk memperkuat Transformasi Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan serta meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka Reformasi Birokrasi sesuai Sasaran Strategis. Kemampuan Iptek dan Inovasi dimaknai oleh Keahlian Sumber Daya Manusia dan Lembaga Litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (Kelembagaan, sumber daya dan jaringan).

Adapun untuk memaknai daya saing bangsa adalah kontribusi Iptek dan Pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukan oleh keunggulan produk Teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan SDM yang berkarakter unggul dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkanlah misi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi

Nasional untuk menjawab permasalahan pembangunan iptek dengan uraian sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapabilitas IPTEK, Budaya Riset, dan Penciptaan Inovasi melalui peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Penguatan Transformasi Ekonomi, dan Pembangunan berkelanjutan berlandaskan budaya iptek untuk peningkatan daya saing.
b. Peningkatan Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Selain mendasarkan pada rencana strategis pada Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rencana strategis Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara juga tetap memperhatikan rencana strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting sebab spektrum kelitbangan di wilayah Kalimantan Timur didorong untuk saling men-*support* dalam mencapai tujuan besar pengembangan daerah di wilayah Kalimantan Timur yaitu sebagai pusat agroindustri dan energi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan Tujuan dan Sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan yang diharapkan dapat mengetahui kelebihan / kekuatan yang dimiliki untuk melaksanakan aktivitas dan tidak melakukan suatu kegiatan yang mempunyai kekurangan / kelemahan. Adapun Tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah “ Meningkatnya Kinerja Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah “, sedangkan Indikator Tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah “ Persentase rekomendasi yang termanfaatkan oleh pemangku kepentingan senagai salah satu bahan penyusunan Kebijakan daerah “.

Hal ini dimaksudkan agar Brida mampu mencapai tujuan dan sasarannya, sehingga tidak ada satu sasaran pun atau aktivitas yang tertunda atau tidak tercapai. Perumusan tujuan yang ditetapkan oleh BRIDA diupayakan untuk mengikuti kriteria keberhasilan perumusan yaitu :

1) Aksestabilitas, yang berarti tujuan dapat diterima oleh berbagai pihak dalam lingkungan Balitbangda.
2) Fleksibilitas, yakni mudah untuk disesuaikan dengan perubahan yang begitu cepat.
3) Dapat diukur, yaitu berarti tujuan dapat dinyatakan secara nyata dan jelas.
4) Motivator, sebagai pendorong bagi kinerja yang terpenuhi yang berarti tujuan cukup jelas namun masih dalam batasan untuk dapat dicapai.
5) Kesesuaian dengan rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah.
6) Mudah dipahami.

Berdasarkan kriteria diatas, ditetapkan strategi untuk mencapai tujuan Brida Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan kegiatan Kelitbangan di Bidang Pemerintahan Daerah dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi Daerah.
2) Merumuskan hasil akhir Kelitbangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
3) Mempublikasikan hasil-hasil Kelitbangan melalui jurnal penelitian dan buletin serta media massa cetak dan media massa audio visual.
4) Menyampaikan hasil Kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat (pemangku kepentingan).

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Brida Kabupaten Kutai Kartanegara adalah **“ Meningkatnya Kinerja Kelitbangan dalam Pengguatan Inovasi Daerah “** sedangkan Indikator sasaran terdiri dari :

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
2. Indeks Inovasi Daerah

Dari dua indikator tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk target kinerja oleh masing-masing bidang sebagai berikut :

1) Tersedianya rekomendasi kebijakan di Bidang Pemerintahan Daerah dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi Daerah sesuai kebutuhan daerah.
2) Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di Bidang Pemerintahan Daerah dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi Daerah sesuai kebutuhan daerah.
3) Tersedianya *data base* daerah.
4) Terlaksananya Kajian Mandiri, Tersedianya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung riset atau referensi perumusan kebijakan.
5) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi pelaksanaan kerja organisasi.
6) Terpeliharanya sarana dan prasarana organisasi.
7) Terpenuhinya kebutuhan tenaga jabatan fungsional peneliti yang memadai.
8) Meningkatnya kapasitas keilmuan dan kompetensi pegawai melalui program pelatihan dan pengembangan pegawai.
9) Terwujudnya pelayanan keuangan yang lebih cepat dan akurat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.
10) Terwujudnya koordinasi internal dan lintas lembaga yang efektif.
11) Meningkatnya tingkat kematangan Inovasi Daerah.
12) Meningkatnya Kinerja Tim Kelitbangan.

Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan bagian konsep berkesinambungan (integral), tak terpisahkan dari suatu proses perencanaan strategik. Sasaran fokusnya pada *action*, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dapat diwujudkan.

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah –kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi, Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara yaitu Program Kegiatan Pembangunan melalui Kutai Kartanegara IDAMAN TERBAIK, RPJMD, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam menyusun program dan kegiatan BRIDA Tahun 2026 tetap memperhatikan upaya – upaya Meningkatnya kinerja Kelitbangan dalam penguatan inovasi daerah dengan Indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan Indeks Inovasi Daerah Serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja BRIDA.

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegaiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2026 dengan pagu indikatif berdasarkan Rencana Strategis Periode Tahun 2025 – 2029 Badan Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp. 37.660.000.000,- adalah sebagai berikut :

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan		Lokasi	Target	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	5 Laporan	750.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	9 Dokumen	11.270.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	4 Dokumen	125.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	6 Dokumen	300.000.000
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Kutai Kartanegara	7 Pelayanan	1.000.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	12 Bulan	765,000,000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kutai Kartanegara	1 Unit	500.000.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kutai Kartanegara	242 Unit	400.000.000
9	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian peraturan	Kutai Kartanegara	29 Dokumen	6.400.000.000
10	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kutai Kartanegara	13 Dokumen	7.000.000.000
11	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kutai Kartanegara	9 Dokumen	4.350.000.000
12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Kutai Kartanegara	5 Dokumen	4.800.000.000

c. Rumusan Program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD

Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah telah difinalisasi melalui forum Pendampingan penggunaan aplikasi SIPD-RI dan Verifikasi Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Rancangan Akhir Renja PD tahun 2026 dalam Aplikasi SIPD-RI dan E-RPJMD. Terdapat perbedaan antara rumusan rancangan akhir BRIDA terhadap rancangan awal RKPD, hal ini dipengaruhi adanya analisis yang dilakukan oleh Brida pada saat penyusunan ranhir serta adanya usulan paket pekerjaan dari stakeholder terkait yang mempercayakan kepada Brida untuk melakukan penelitian/pengkajian terhadap isu-isu strategis yang dihadapi oleh stakeholder. Selain itu juga adanya mandatory dari pemerintah daerah yang berdampak pada berubahnya rancangan akhir rencana kerja Brida tahun 2026 terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026.

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Sebagaimana Format Tabel berikut ini :

Sebagai gambaran dari rumusan program dan kegiatan sesuai rancangan akhir RKPD, maka data dapat dilihat pada tabel TC-33 Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Badan Riset dan Inovasi Daerah dibawah ini :

TABEL TC. 33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)		
										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**APBD**		**100**	**Persen**	**Rp 12.586.849.142,00**
5	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**5**	**Laporan**	**350.000.000**
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	APBD		1	Laporan	150.000.000
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Brida	APBD		1	Laporan	50.000.000
5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Brida	APBD		1	Laporan	100.000.000
5	05	01	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Brida	APBD		1	Laporan	50.000.000
5	05	01	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Brida	APBD		1	Berita Acara	-
5	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**9**	**Dokumen**	**11.301.598.055**
5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Brida	APBD		70	Orang/Bulan	11.056.598.055
5	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Brida	APBD		1	Laporan	50.000.000
5	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Brida	APBD		6	Laporan	170.000.000
5	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Brida	APBD		1	Dokumen	25.000.000
5	**5**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**4**	**Dokumen**	**83.626.800**
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	APBD		1	Dokumen	25.000.000
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Brida	APBD		1	Laporan	33.626.800

					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Brida	APBD		2	Laporan	25.000.000
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-		-	-	-
5	**05**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**6**	**Dokumen**	**32.900.420**
2	05	01	2,05	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fu	Brida	APBD		20	Orang	-
2	05	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Brida	APBD		70	Orang	32.900.420
5	**05**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan administrasi umum**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**7**	Pelayanan	**307.359.308**
5	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Brida	APBD		3	paket	68.248.300
5	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Brida	APBD		2	paket	97.548.503
5	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Brida	APBD		2	paket	13.080.930
5	05	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Brida	APBD		2	paket	33.962.575
5	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Brida	APBD		88	Laporan	69.147.400
5	05	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Brida	APBD		1	Dokumen	25.371.600
5	05	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Brida	APBD		1	Dokumen	0
5	**05**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**12**	**Bulan**	**116.439.519**
5	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Brida	APBD		12	Bulan	65.000.000
5	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Brida	APBD		12	Bulan	51.439.519

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**1**	**Unit**	**85.455.040**
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Brida	APBD		1	paket	85.455.040
5	**05**	**01**	**2,08**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**Brida**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**242**	**Unit**	**309.470.000**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Brida	APBD		30	Unit	239.470.000
5	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Brida	APBD		212	Unit	70.000.000
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**1. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan 3. Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Persentase Perangkat Daerah yang**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**APBD**		**100**	**Persen**	**Rp 8.405.000.000,00**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**12**	**Dokumen**	**2.025.000.000**
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD				
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : Kajian Kebijakan Teknis Penanganan ODGJ Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Laporan	100.000.000
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Kajian Kebijakan Tata Kelola Parkir Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Dokumen Naskah Akademik Perkada) (200 juta) b. Kajian Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan (150 juta) c. Kajian Kebijakan Pemerintah Tentang Regulasi Program Kukar	3	Laporan	850.000.000

5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD				
	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : Penyusunan Laporan hasil fasilitasi pelaksnaan rekomendasi hasil kelitbangan bidang penataan Aset Pemda	1	Dokumen	100.000.000
5	05	02	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Penyusunan Laporan hasil fasilitasi pelaksnaan rekomendasi hasil kelitbangan bidang penataan kelembagaan desa (75 juta); b. Kajian pembentukan 5 Desa Baru (Tanjung Limau, Loa Janan Ulu, Lamin Telihan, Loa Ipuh Darat, Tanjung Harapan) (300 juta)	2	Laporan	375.000.000
5	05	02	2.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : Kajian Kebijakan Pemerintah Terkait Standarisasi Balai Penyuluh KB dan Tenaga Penyuluh KB	1	Laporan	125.000.000
5	05	02	2.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD				-
5	05	02	2.01	11	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : Fasilitasi evaluasi Pemerintah Terhadap Peran Bumdes Dalam Mengembangkan Ekonomi Desa Yang Berbasis Pada Potensi Lokal	1	Laporan	100.000.000
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : Pengelolaan Jurnal dan Ekspos Hasil Badan Riset dan Inovasi Daerah	1	Laporan	125.000.000
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Revisi Kebijakan Pemerintah Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan (100 juta); b. Kebijakan Pemerintah Tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Di Unit Kerja/Pelaksana Teknis (150 juta)	2	Dokumen	250.000.000
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD				-
5	**05**	**02**	**2.04**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**10**	**Dokumen**	**1.855.000.000**
5	05	02	2.04		Sub Kegiatan Litbang Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Litbang Partisipasi Masyarakat	20 Kecamatan	APBD	1. Survei Indeks Kebahagiaan (125 juta) 2. Survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (200 juta) 3. Survei Indeks Pembangunan Hukum (200 juta) 4. Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (125 juta) 5. Survei/Kajian IDSD (125 juta) 6. Tingkat Kriminalitas (Crime Rate) (30 juta) 7. Survei Indeks Anti Korupsi (125 juta) 8. Indeks Kesulitan Geografis (125 juta) 9. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (125 juta) 10. Indeks Ketahanan Daerah (125 juta)	6	Dokumen	1.305.000.000

5	05	02	2.04		Sub Kegiatan Litbang Dikbud	Jumlah Dokumen Litbang Pendidikan dan Kebudayaan	Sebaran Situs di Muara Kaman	APBD	1. Penguatan Kurikulum Terkait Kearifan Lokal (Revitalisasi Bahasa Daerah dan Penggunaan Pakaian Adat di Sekolah)	1	Dokumen	150.000.000
5	05	02	2.04		Sub Kegiatan Litbang Kesehatan	Jumlah Dokumen Litbang Kesehatan	6 Kecamatan	APBD	1. Kajian Analisis Situasi dan Pemetaan Stunting Serta Faktor Determinan Penyebabnya (125 juta) 2. Survei Indeks Harapan Hidup (125 juta)	2	Dokumen	250.000.000
	05	02	2.04		Sub Kegiatan Litbang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen Litbang Bidang Aspek-aspek Sosial	12 Kecamatan	APBD	1. Dampak Program Bantuan Kepada Masyarakat Terhadap Penurunan Kemiskinan	1	Dokumen	150.000.000
5	05	02	2.04		Sub Kegiatan Litbang Pariwisata	Jumlah Dokumen Litbang Pariwisata	Kec. Tenggaroang Seberang	APBD				-
5	**05**	**02**	**2.04**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.**	**Kukar**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**9**	**Dokumen**	**3.325.000.000**
5	**05**	**02**	**2.04**	**01**	**Penelitian dan Pengembangan ESDM**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan ESDM**	**Kukar**	**APBD**		**1**	**Dokumen**	**300.000.000**
					Analisis Karakteristik Tingkat Kesuburan tanah pada Lahan Pasca Tambang	Jumlah Dokumen Analisis Karakteristik Tingkat Kesuburan tanah pada Lahan Pasca Tambang	Kukar	APBD	Kajian Kelayakan Lubang Pasca Tambang (Void) Untuk Penyediaan Air Bersih	1	Dokumen	300.000.000
					Kajian Pemanfaatan lubang bekas tambang (Void) untuk penyediaan bahan baku air bersih.	Jumlah Dokumen Kajian Pemanfaatan lubang bekas tambang (Void) untuk penyediaan bahan baku air bersih.	Kukar	APBD	Tempat tampungan bahan baku air bersih (Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja, karena ketiga lokasi tesebut tidak tersedia air permukaan yang cukup/**Masukan dari Kepala PDAM saat Forum Lintas Perangkat Daerah**).	1	Laporan	0
5	**05**	**02**	**2.04**	**02**	**Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**	**Kukar**	**APBD**		**1**	**Laporan**	**300.000.000**
					Kajian sistem Pengembangan Transportasi Pedesaan	Kajian Sistem Pengembangan Transportasi Pedesaan	Kukar	APBD	Usulan dari **Sekretaris Dinas Perhubungan saat Forum Lintas Perangkat Daerah.**	1	Dokumen	300.000.000
5	**05**	**02**	**2.04**	**03**	**Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan**	**Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan**	**Kukar**	**APBD**		**1**	**Laporan**	**525.000.000**
					Penyusunan Dokumen Indeks Komoditi Kelautan dan Perikanan	1. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Kukar	APBD	Data hasil penelitian/kajian untuk mengisi **IKU Dislutkan.**	1	Laporan	125.000.000
						2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Kukar	APBD		1	Laporan	150.000.000
						Pengelolaan Hilirisasi Rumpu Laut, Hatchery dan Tempat Pemasaran Ikan	Kukar	APBD		1	Laporan	250.000.000
5	**05**	**02**	**2.04**	**03**	**Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan**	**Kukar**	**APBD**		**8**	**Dokumen**	**1.650.000.000**
					Kajian Subsidi Input dan atau Output Kepada Petani/Pekebun Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pekebun.	Jumlah Dokumen Kajian Subsidi Input dan atau Output Kepada Petani/Pekebun Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pekebun.	Kukar	APBD	Usulan dari **Dinas Pertanian dan Peternakan saat Forum Lintas Perangkat Daerah (Dasar kebijakan pemberian bantuan/insentif kepada petani/pekebun).**	1	Dokumen	150.000.000
					Survei Pola Distribusi Pangan Utama (Beras) di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Jumlah Dokumen Survei Alur Distribusi Bahan Pokok Penting (BAPOKTING) di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kukar	APBD	Usulan dari **Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan saat Forum Lintas Perangkat Daerah (Dasar untuk menganalisis/ menghitung ketersediaan pangan utama di Kukar).**	1	Dokumen	500.000.000
					Penyusunan Dokumen Indeks Nilai Tukar Petani (NTP Komoditi Pertanian dan Perkebunan).	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Indeks Nilai Tukar Petani (NTP Komoditi Pertanian dan Perkebunan).	Kukar	APBD	Data hasil penelitian/kajian untuk mengisi **IKU Dinas Perkebunan serta Dinas Pertanian dan Peternakan.**	1	Dokumen	150.000.000
					Survei Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutaanan.	Jumlah Dokumen Survei Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.	Kukar	APBD	Data hasil penelitian/kajian untuk mengisi **IKU Dislutkan, IKU Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Perkebunan**	1	Dokumen	250.000.000

						Indeks Ketahanan Pangan				1	Dokumen	125.000.000
						Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)				1	Dokumen	150.000.000
						Evaluasi Kelembagaan Lumbung Pangan				1	Dokumen	125.000.000
						Kajian Tata Kelola dan Strategi Tata Niaga Hilirisasi Minyak Makan Merah				1	Dokumen	200.000.000
5	**05**	**02**	**2.04**	**03**	**Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan UKM**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan UKM**	**Kukar**	APBD		**4**	**Dokumen**	**550.000.000**
						Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif				1	Dokumen	150.000.000
						Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata				1	Dokumen	125.000.000
						Kajian Optimalisasi dan Pengembangan Pasar Desa				1	Dokumen	125.000.000
					Survei Pertumbuhan Ekonomi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Kajian Pengelolaan Kawasan Tuah Himba, Pujasera dan Gedung Ekraf secara terintegrasi	Kukar	APBD	Data hasil penelitian/kajian untuk mengisi **IKU Dinas Pariwisata.**	**1**	**Dokumen**	150.000.000
5	**05**	**02**	**2.04**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi**	**Kabupaten Kutai Kartanegara**	**APBD**	**Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026**	**6**	**Dokumen**	**1.200.000.000**
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Penyusunan Policy Brief dan Monev Inovasi sebagai salah satu indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah;	2	Dokumen	300.000.000
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Pembuatan Mesin Hasil Penelitian Pengolahan Potensi Desa One Village One Product	1	Laporan	250.000.000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah; b. Mengikuti Lomba Inovasi Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;	1	Laporan	400.000.000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Pembaharuan aplikasi https://inovasi.kukarkab.go.id/; b. Pembuatan video inovasi; c. Publikasi inovasi dan hasil penelitian.	1	Laporan	150.000.000
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBD	Paket Pekerjaan : a. Indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah;	1	Laporan	100.000.000
											Total Pagu	**Rp**	**20.991.849.142**

BAB V

PENUTUP

a. Catatan penting :

Catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan yang dibutuhkan dalam kurun waktu selama 6 bulan mulai dari penyusunan pengelola administrasi kegiatan sampai dengan laporan akhir kegiatan, maka kegiatan kelitbangan akan mengambil kegiatan yang sangat prioritas dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Brida.

23. Kaidah-kaidah pelaksanaan :

Pelaksananaan kegiatan dibutuhkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

a. Judul kegiatan berdasarkan Indea consep paper (ICP)
b. Dilanjutkan dengan Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan.
c. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran.
d. Pembuatan Dokumen Perencanaan Anggaran.
e. Pembuatan SK Pejabat Kuasa Penguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
f. Pembuatan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
g. Penunjukan Tenaga Peneliti.
h. Pengajuan Proposal.
i. Kesepakatan Kerjasama Kegiatan.
j. Pelaksanaan Kegiatan (Pengambilan Data, Pembuatan Draf Laporan Hasil, Laporan Hasil, Pra Seminar Dan Seminar, Laporan Akhir).
k. Penyampaian Rekomendasi Ke Pemangku Kepentingan.

24. Rencana tindak lanjut

Untuk memastikan keberhasilan capaian kinerja sesuai dengan target dan indikator yang sudah ditetapkan, maka diperlukan evaluasi dan monitoring di setiap kegiatan secara periodik. Diharapkan seluruh aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Kartanegara memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kerja tahun 2026 dan sebaik-baiknya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, singkronisasi, harmonisasi, sinergitas dan efektifitas dalam melaksanakan Kegiatan.

Akhirnya dengan memanjatkan fuji syukur kehadirat Allah. SWT, Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat disususn dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan dan semoga menjadi pedoman yang dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tenggarong, Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda-Balitbangda Lt.4

TENGGARONG

RANHIR RENJA